BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : Rehabilitasi Hutan
Edisi : 15/September/2007
Hari : Sabtu
Halaman : 10

Kaban: Enam Provinsi Tolak Rehabilitasi Hutan

[YOGYAKARTA] Menteri Kehutanan MS Kaban menjelaskan, enam provinsi menolak ikut terlibat dalam upaya rehabilitasi dan reboisasi hutan seluas 5 juta hektare, karena tidak punya waktu untuk mencapai target yang dinginkan pemerintah., rumitnya prosedur dalam penunjukan langsung, dan khawatir dipermasalahkan KPK dan Kepolisian, jika program ini belum selesai sampai akhir tahun. Namun, Kaban tidak menyebutkan provinsi-provinsi mana yang menolak

MS Kaban mengatakan itu kepada wartawan seusai memberi kuliah umum 'Tantangan Forester ke Depan dalam menghadapi Penurunan Potensi dan Fungsi Sumber Daya Hutan', di Ruang Seminar Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (14/9).

Lebih lanjut, Kaban mengatakan, selain penolakan dari enam provinsi yang tidak disebutkan biaya yang diperlukan cukup besar. Setidaknya harus ada dana sekita Rp 4-5 juta untuk per-satu hektarnya. "Kita memerlukan dana sekitar Rp 8 triliun untuk reboisasi lahan seluas 2 juta hektar, padahal penerimaan negara dari hasil hutan bukan pajak hanya Rp 2,5 triliun per tahun," terang Kaban.

Dijelaskan, akibat penyalahgunaan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) serta pembakalan liar, hutan seluas 50 juta hektar di Indonesia mengalami degradasi. Pemerintah hanya mampu melakukan upaya rehabilitasi dan reboisasi sebesar 2 juta hektar per tahun, sehingga untuk mencapai 50 juta hektare dibutuhkan rehabilitasi secara berkesinambungan selama 25 tahun.

"Target pemerintah, pada tahun 2009 lima juta hektare mampu tergarap dan akhir tahun ini harus dua juta hektare. Dengan penolakan itu, jelas target kita akan meleset. Ini masuk dalam pembahasan oleh presiden," katanya.

Terkait dengan para pemegang HPH yang juga ikut merusak hutan, Kaban mengakui bahwa untuk mencabut ijin mereka, tidak menyelesaikan masalah.

"Sampai sekarang sudah ada 141 HPH yang dicabut, ternyata kerusakan hutan belum berarhir. Yang penting harus ada *sustainable forest management* dengan sistem tebang pilih dan bagaimana mengupayakan revitalisasi hutan secepatnya," tegas Kaban. [152]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup